

MENGERITISI KECENDERUNGAN PEMBERITAAN KONFLIK PADA MEDIA PERS DI INDONESIA*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Dalam pandangan sosiologis, hubungan media jurnalisme dengan masyarakat berlangsung atas dasar fungsi imperatif yang dijalankan oleh media jurnalisme melalui pemberitaannya. Sementara pemberitaan merupakan penyampaian fakta-fakta sebagai informasi yang berasal dari kehidupan masyarakat. Penyampaian ini dapat berupa cerita (*story*) dengan bermacam format, seperti berita langsung (*straight news*) dan berita interpretatif (*interpretative news*), ataupun berupa komentar dalam format artikel opini (*opinioted pieces*). Seluruh format ini berkaitan dengan kaidah yang bersifat teknis (*technicalities*) sebagai dasar dalam menulis suatu teks.

Selain aspek penulisan, kegiatan jurnalisme akan berkaitan dengan penentuan dalam memilih fakta-fakta yang akan dijadikan informasi. Masih bersifat teknis, kalangan pengelola media jurnalisme biasa menggunakan kaidah kelayakan berita (*news-worthy*) dalam menghadapi fakta-fakta. Proses jurnalisme diwujudkan melalui tahapan pilihan-pilihan teknis yang dilakukan oleh pengelola media dalam menghadapi fakta-fakta saat menyiapkan dan menyajikan berita, dan tahapan berikutnya sejauh mana obyektifitas dapat dijalankan dalam memproses fakta-fakta tersebut (McQuail, 1987).

Dalam kerja sehari-hari, biasanya perhatian lebih banyak ditujukan terhadap kecenderungan dalam melakukan pilihan teknis atas fakta. Pilihan teknis ini diasumsikan untuk memenuhi kepentingan khalayak. Karenanya dalam orientasi pemberitaan, standar teknis yang berkaitan dengan berita menjadi perhatian utama.

Dalam lingkungan jurnalisme bebas terkenal pemeo klasik: “*give the public what it wants*” (Bond, 1961). Karenanya standar kelayakan seakan-akan dirumuskan berdasarkan keinginan khalayak, baik bersifat sosial ataupun psikhis. Tetapi pandangan ini hanya dari satu sisi. Sementara pada sisi lainnya, media juga punya kepentingan pragmatis. Motif pengelola media dapat dalam kaitan sosial dan ekonomi-politik (*political economy*). Standar teknis ini merupakan resultante dari dorongan kepentingan pragmatis khalayak dan pengelola media.

Dua sisi kepentingan pragmatis khalayak secara sederhana dapat dilihat dari sisi pertama yaitu dorongan sosial, sebagai dasar untuk pegangan dalam memasuki kehidupan publik. Biasa disebut sebagai dorongan untuk memasuki dunia-luar (*outer-world*) dirinya, yang dibedakan dengan kepentingan atas sisi kedua yaitu dorongan psikhis yang hanya untuk memenuhi kepuasan dunia-dalam (*inner-world*). Kedua macam dorongan ini dari sisi lain dapat dilihat sebagai proses obyektifikasi (*objectification*) dan subyektifikasi (*subjectification*). Obyektifikasi merupakan proses untuk mencapai obyektifitas atas dunia-luar, sementara subyektifikasi dimaksudkan untuk membangun subyektifitas bagi dunia-dalam diri seseorang (lihat: Berger dan Luckmann 1967).

Kepentingan seseorang untuk memasuki *outer-world* ditentukan oleh peran sosialnya dan derajat otonomi dan independensinya. Secara hipotetis dapat disebutkan bahwa bertolak dari skala peran sosialnya maka kebutuhan seseorang akan informasi berbeda-beda jumlah dan variannya. Informasi ini sesuai dengan fungsinya untuk dijadikan dasar dalam menentukan sikap dan tindakan dalam kehidupan sosial. Dengan peran yang harus dijalankan secara otonom dan independen, maka seseorang lebih memerlukan obyektifitas untuk dapat mengambil keputusan secara obyektif bagi dirinya maupun pihak

* Makalah disampaikan pada Seminar *Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai*, Yayasan Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS), Medan 19 April 2001

lain. Sebaliknya dengan peran sosial seseorang yang rendah, menyebabkan kecenderungannya pada informasi untuk memenuhi *inner-world* akan lebih tinggi pula. Kecenderungan subyektifikasi pada dasarnya untuk memenuhi subyektifitas bersifat pribadi ataupun komunal.

Sedangkan dengan derajat otonomi diri seseorang akan menentukan orientasinya dalam menghadapi informasi. Dengan landasan otonomi dan independensi yang tinggi seseorang akan memiliki kecenderungan obyektifikasi, sebaliknya dengan derajat dependensi yang rendah akan lebih berkecenderungan pada subyektifikasi bagi struktur pribadi ataupun dalam struktur komunal yang menjadi ruang sosialnya.

Keberadaan media jurnanisme memiliki dinamika yang bertolak dari kecenderungan subyektifnya sendiri maupun kepentingan subyektif pihak lain yang bukan khalayaknya. Dalam kondisi semacam ini, media tidak menjalankan fungsi imperatif sosial, tetapi menjalankan fungsi organik. Kepentingan media dilihat melalui orientasinya, untuk itu dapat dihipotesiskan, yaitu dengan orientasi sosial maka fungsi imperatif media jurnanisme akan tinggi, sebaliknya fungsi ini rendah jika kepentingan dengan orientasi ekonomi-politik. Hal ini juga akan bertalian dengan landasan otonomi dan independensi dengan orientasi sosial yang akan menggerakkan fungsinya dalam kebijakan pemberitaan. Kebijakan dengan orientasi sosial akan melahirkan kecenderungan obyektifikasi untuk mencapai obyektifitas informasi, sedang dalam orientasi ekonomi-politik dalam proses komodifikasi yang menghasilkan komoditas ekonomi (bisnis) ataupun politik (lihat: Mosco, 1996).

Motif khalayak dan media akan bertemu dengan fungsi-fungsi yang simetris. Dari sini informasi dapat dibedakan dari fungsinya yaitu bersifat informasional sosial dan hiburan. Bertemunya motif khalayak dan media ini tidak menjadi masalah sepanjang berada dalam koridor yang sama. Subyektifikasi pribadi khalayak untuk memenuhi motif hiburan dapat dipenuhi oleh komoditas informasi hiburan. Sedangkan subyektifikasi komunal (ideologis) khalayak dipenuhi oleh komoditas informasi politik.

Selain itu sifat informasi dalam konteks motif ini berada dalam rentangan antara penting (*significance*) dan menarik (*interesting*). Dengan pengertian ini setiap fakta dilihat selalu berada di antara dua titik ekstrim, dengan arah pendulum ke salah satu kutub. Dalam kerja jurnalistik biasanya kedua aspek ini merupakan rekayasa teknis. Karenanya setiap fakta yang penting, diusahakan agar menjadi menarik dalam penyampaian, sementara fakta yang menarik tetap dicari unsur yang bernilai penting.

(2)

Bahwa kerja jurnalistik mengolah fakta menjadi informasi jurnanisme, dapat dibicarakan dalam tataran teknis, tetapi perlu juga dilihat dalam tataran ideal normatif. Dalam masyarakat demokratis, media jurnanisme diharapkan dapat menjalankan fungsi imperatif dalam masyarakat. Fungsi imperatif ini diwujudkan dalam proses menghubungkan warga dengan kehidupan publik dalam dimensi politik, ekonomi dan kultural. Landasan ideal normatif dalam proses imperatif ini pada dasarnya ditarik dari platform demokrasi dalam kehidupan bernegara (*polity*). Dengan demikian keberadaan media jurnanisme tidak dapat terlepas dari platform demokrasi yang menjaga keberadaan warga dalam konteks kebebasan, baik kebebasan dengan dirinya maupun berada dalam kebebasan ruang publik. Secara sederhana kebebasan dilihat dalam dua sisi yaitu “kebebasan untuk” (*freedom for*) dan “kebebasan dari” (*freedom from*).

Dengan demikian pertanyaan dalam jurnanisme adalah bagaimana bekerjanya proses menghubungkan warga dengan kehidupan publik dalam platform demokrasi, tidak bekerja sendiri. Keberadaan warga dalam kehidupan publik berlangsung dalam berbagai institusi, dalam dimensi politik beroperasi institusi politik, sementara dalam dimensi ekonomi bekerja institusi bisnis, begitu pula berbagai institusi publik yang berorientasi

kultural. Dinamika kehidupan warga, dalam atau menghadapi, berbagai institusi publik inilah yang menjadi sumber bagi media jurnalisme. Dengan kata lain, materi yang dijadikan informasi jurnalisme adalah fakta yang berasal dari kehidupan publik. Inilah yang membedakan media jurnalisme dengan media lainnya, yaitu dalam pengutamaan informasi yang berasal dari fakta publik. Karenanya fakta personal kendati menjadi informasi media, tidak dapat disebut sebagai informasi jurnalisme.

Dalam menghadapi proses kerja ini setiap jurnalis pada umumnya bertolak dari kaidah teknis yang biasa disebut sebagai nilai berita atau standar kelayakan berita. Kadangkala kaidah teknis ini dianggap sebagai dogma yang keramat, dengan melupakan masalah epistemologi yang mendasari kerja profesi ini. Dalam kaidah epistemologi, jurnalis perlu melakukan pendenifisian (*defining*) kedua ranah (*domain*) fakta dan informasi. Untuk itu perlu disadari bahwa setiap pendefinisian selamanya bertolak dari preferensi atau kecenderungan terarah dari pihak yang mendefinisikan. Preferensi ini dapat dalam konteks skala pribadi, kolektif dalam manajemen korporasi, atau yang lebih universal. Selain itu preferensi dapat juga bersifat subyektif atau sebaliknya obyektif. Berbagai buku teks jurnalisme umumnya memberikan pendefinisian atas fakta sekaligus informasi jurnalisme. Seorang penulis misalnya merumuskan kelayakan berita sebagai berikut:

1. Impact or importance of the event.
2. Timeliness of the event.
3. Prominence of the people involved in the event.
4. Proximity, the closeness of the event to readers and listeners.
5. Conflict.
6. The unusual, bizzare nature of the event.
7. Curency, the interest people have in the situation. (Mencher, 1987: 58)

Atau penulis lainnya sebagai berikut:

1. Impact
2. Proximity
3. Timeliness
4. Prominence
5. Novelty
6. Conflict (Brooks, et.al. 1988: 4 – 5)

Boleh dikata setiap buku akan mencantumkan konflik sebagai unsur dari standar kelayakan berita. Pendefinisian ini mengabaikan faktor yang penting yaitu latar sosial dari mana suatu fakta didefinisikan. Dengan kata lain, setiap makna hanya dapat diidentifikasi dari perbandingan dengan lainnya. Sebagai ilustrasi, pendefisian dengan cara lain diberikan oleh Mencher sebagai berikut:

News is information about a break from the normal flow of events, an interruption in the expected

News is information people need in order to make sound decisions about their lives.
(Mencher, 1987)

Dalam pengertian ini nilai suatu berita dapat dilihat dari dua sisi, pertama bersifat intrinsik, terkandung dalam fakta itu sendiri, dan kedua bersifat ekstrinsik sesuai dengan pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak. Suatu fakta pada dasarnya merupakan penggalan dari suatu proses sosial, dan sebagai suatu peristiwa yang tidak diperkirakan terjadinya. Dengan kata lain, makna suatu fakta tidak dapat dilepaskan dari ruang sosial dimana fakta itu muncul. Pada sisi lain, secara ekstrinsik fakta tadi memiliki makna bagi kehidupan khalayak.

Dengan demikian suatu fakta hanya dapat dipandang bernilai jika ditempatkan dalam proses sosial yang menjadi “ruang”nya. Di jalan yang lalu-lintasnya sehari-hari lancar dan tenang, sekali terjadi kemacetan dan kehirukan maka fakta itu akan memiliki nilai yang tinggi. Sebaliknya, jalan raya yang sehari-hari macet di Jakarta, di saat ditinggal pemudik maka kelengangan akan menjadi suatu fakta bernilai. Ruang publik yang didominasi kemelaratan misalnya, akan menempatkan wacana kemewahan memiliki nilai tinggi. Sementara dalam ruang kemewahan, kemiskinan menjadi tontonan yang eksotis.

Lebih jauh makna bagi khalayak merupakan dasar dalam pendefinisian suatu fakta dapat bertolak dari motif khalayak sepenuhnya, tetapi pada tataran etis pertanyaan yang menyertainya akan mencari jawaban kontekstual, apa makna fakta itu bagi kehidupan kultural khalayak? Demikianlah obyektifitas berada dalam kaidah epistemologi untuk mencapai kebenaran. Tetapi pada tataran etis, kebenaran itu ditempatkan dalam konteks kebaikan kultural.

Semua makna pada dasarnya selalu memiliki pasangan yang bertentangan secara binari (*binary opposition*), yang menjadikannya signifikan (lihat: Piliang, 2000; Berger, 1998). Nilai kelayakan informasi yang dijadikan acuan dalam menilai suatu fakta kiranya perlu dikembangkan dalam konteks ruangnya. Artinya fakta bukanlah suatu ranah yang steril. Secara konvensional konteks suatu fakta dilihat pertaliannya dengan fakta lain, baik bersifat sebab-akibat maupun pertalian kategoris seajar. Sementara konteks lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah yang bersifat paradigmatik, yaitu asumsi tentang ruang publik yang menjadi “tempat” bagi suatu fakta, untuk kemudian dipertalikan dengan makna yang ingin ditampilkan. Dengan kata lain, setiap teks jurnanisme dipandang sebagai suatu wacana yang berpretensi untuk menghadirkan makna untuk “bertanding” di ruang publik dengan berbagai makna lainnya. “Pertandingan” ini ada yang bersifat diametral, yaitu dalam berhadapan dengan makna yang dilahirkan oleh kekuasaan politik, ekonomi atau kultural (komunalisme).

Suatu fakta memiliki konteks terhadap maknanya dalam ruang publik. Makna selamanya bersifat dikhotomi, sebagaimana dalam filsafat “yin” dan “yang”. Dengan kata lain, suatu fakta pada dasarnya memiliki makna bersifat kontekstual. Secara sederhana binari oposisi ini dapat dipilah dalam kutub “kiri” yang memiliki kesamaan dan kedekatan makna, dan disebaliknya terdapat kelompok lainnya berupa kutub “kanan”.

“KIRI”	←	←	FAKTA	→	→	“KANAN”
Yin			?			Yang
Perdamaian			?			Peperangan
Ketenteraman			?			Kekacauan
Kerukunan			?			Perkelahian
Kemakmuran			?			Kemelaratan
Kekayaan			?			Kemiskinan
Kecerdasan			?			Kebodohan
Altruisme			?			Egoisme
“Bottom-up”			?			“Top-down”
“Empowerment”			?			Dominasi
Demokrasi			?			Tirani
Dan seterusnya						

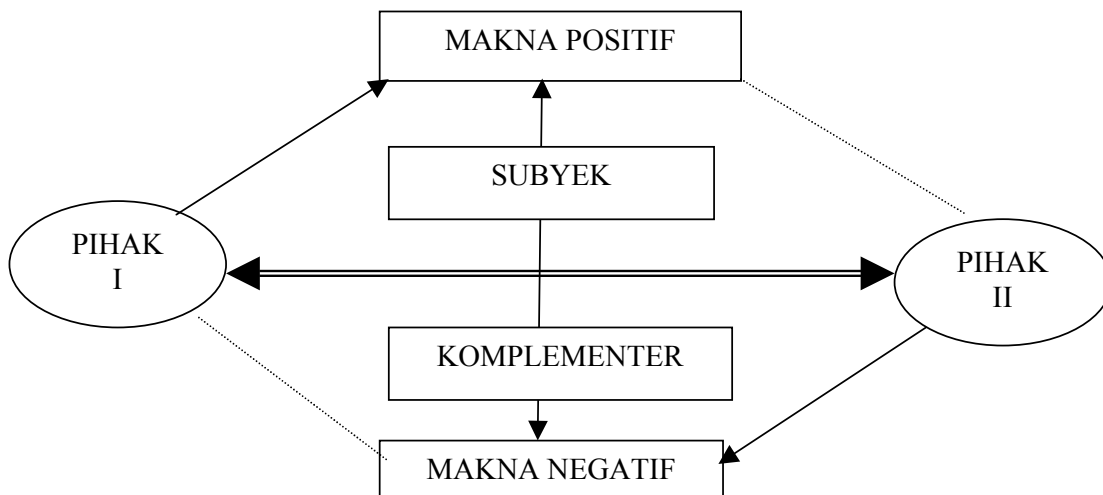
Polaritas dikhotomi oposisi binari merupakan konsep yang bersifat digital, karenanya selamanya mengandung pergeseran makna dari kiri ke kanan, dan sebaliknya. Dengan kata lain, pemaknaan suatu fakta tidak pernah bersifat absolut, dengan adanya kecenderungan oposisi makna yang memberi pemaknaan alternatif. Di antara suatu polaritas terkandung konsep-konsep yang akan merelatifkan makna suatu makna.

Di dalam polaritas dikhotomi oposisi binari ini terdapat oposisi bersifat langsung, dan yang bersifat tidak langsung. Signifikansi makna “perdamaian” berposisi langsung dengan “peperangan”, tetapi dimungkinkan pula berposisi secara tidak langsung dengan “kekacauan”, atau yang lebih jauh seperti “kebodohan”.

(3)

Berita adalah cerita tentang fakta. Sementara cerita dibangun dengan bertitik tolak dari subyek yang dipilih, dan dari sini fakta direkonstruksikan. Subyek pada dasarnya merupakan fokus dari penceritaan atau pendeskripsian. Jika ada 2 pihak yang berinteraksi dalam fakta, maka subyek yang menjadi fokus berita memiliki konteks makna pada salah satu sisi dari oposisi binari. Sehingga wacana yang lahir adalah cerita tentang sisi binari tersebut, sementara sisi lain sebagai komplementer dalam konstruksi fakta. Penentuan sudut pandang (*angle*) dalam fokus penceritaan ini merupakan faktor dalam pengwujudan wacana, tidak ada kaitan dengan azas keseimbangan. Dengan kata lain, dalam merekonstruksikan fakta, seorang jurnalis mutlak harus dengan azas keseimbangan, yaitu dengan memberi peluang yang sama bagi orang (person) dari setiap pihak dalam fakta.

Secara sederhana dapat divisualkan sebagai berikut:



Sudut pandang pada hakekatnya merupakan bidang dimensi yang dipilih sebagai subyek penceritaan. Dengan memilih salah satu dimensi sebagai subyek maka dimensi lainnya akan menjadi komplementer. Dalam azas keseimbangan, setiap dimensi mendapat perlakuan teknis yang sama. Tetapi wacana akan tetap dibangun melalui pilihan subyek tersebut.

Disini perlu dibedakan antara subyek sebagai penentu fokus wacana, dengan orang yang menjadi sumber fakta. Dalam merekonstruksikan setiap fakta, jurnalis memerlukan adanya narasumber (*resources person*). Narasumber adalah orang yang memberikan keterangan mengenai bagian fakta yang direkonstruksikan oleh jurnalis. Dari setiap pihak harus ada yang menjadi narasumber, sementara seluruh cerita (keterangan, komentar atau pun pendapat) tentang fakta. Cerita atau keterangan narasumber ini dapat berupa pengalaman sendiri (bersifat empiris), atau kesaksian (pengetahuan tentang fakta empiris pihak lain), atau pendapat tentang suatu fakta empiris. Dengan demikian posisi seorang

narasumber dari suatu fakta merupakan titik tolak dalam menilai kapabilitas dan relevansinya.

(4)

Lalu mengapa konflik dipandang bermakna? Jika konflik merupakan suatu fakta yang berasal dari penggalan suatu proses sosial, maka perlu dilihat bagaimana sifat proses sosial tersebut. Konteks proses sosial sebagai latar bagi fakta konflik biasanya diabaikan. Padahal konflik hanya bermakna jika berada dalam ruang publik yang tenteram. Seperti halnya perang akan bermakna dalam ruang sosial yang damai.

Fakta publik hanya dapat diidentifikasi dari ruang publik yang melahirkannya. Dengan perspektif ini maka pemahaman tentang ruang publik menjadi penting. Dalam istilah sehari-hari, gambaran tentang ruang publik ini disebut sebagai visi. Kerja profesional pada hakekatnya merupakan proses teknis yang menjembatani visi ke misi. Karenanya setiap pekerja media jurnalisme tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi yang lebih utama adalah kesadaran tentang ruang publik yang menjadi lahan bagi fakta yang akan dituainya.

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, ruang publik dipandang telah menyediakan kebebasan pers. Kebebasan pers (*freedom of the press*) berlandaskan prinsip demokrasi yang menjadi acuan nilai bersama (*shared value*) di ruang publik. Sebagaimana disebutkan, ruang publik dilihat dalam dimensi-dimensi politik, ekonomi dan kultural. Saat ini bagi pengelola media massa, ruang publik dilihat hanya dalam konteks ekonomi, sehingga merupakan pasar bebas. Inilah yang dimanfaatkan oleh investor yang meramalkan dunia penerbitan saat ini, dengan bermacam format produk, mulai dari media yang mengutamakan informasi sosial, sampai gosip tentang artis dan politisi, serta cerita-cerita jin dan hantu. Karenanya saat ini yang berlangsung berupa pers bebas (*free press*), belum kebebasan pers (*press freedom*), dengan kebanyakan perusahaan yang muncul untuk menjalankan proses komodifikasi media.

Basis bagi kebebasan pers adalah kualitas ruang publik. Tetapi kualitas ruang publik bukan hanya dilihat dari sifatnya sebagai pasar. Ruang publik merupakan ajang bagi aktivitas manusia dalam konteks politik (termasuk hukum) dan budaya. Ruang ini menyediakan fakta yang menjadi bahan informasi pers, sekaligus yang akan menerima informasi tersebut. Dinamika ruang publik bergerak atas acuan nilai bersama, sebagai proses sosial yang normal. Sebaliknya dapat pula ruang publik didominasi oleh proses yang bersifat anomali, tidak dapat dicari pertalian dengan suatu nilai sosial dan makna kultural.

Fakta berasal dari ruang publik, dan informasi dikembalikan kepada warga untuk kehidupannya di ruang publik. Dengan demikian pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa peran media jurnalisme dalam proses tersebut? Setiap kali dibayangkan peran yang dijalankan oleh media jurnalisme adalah dalam jurnalisme pembangunan. Konsep jurnalisme semacam ini pada hakekatnya sebagai media partisipan, disatu pihak berlangsung korporatisme negara, dan pada sisi lain takluknya pengelola media jurnalisme dengan menempatkan diri secara organis sub-ordinasi dalam rezim negara.

Dengan tiadanya kekuasaan *top-down* dari kekuasaan negara, bukan berarti media jurnalisme menemukan jati dirinya sebagai institusi dengan fungsi imperatif yang tepat dalam mengisi ruang publik. Persoalannya, pendefinisian tentang ruang publik tidak pernah dilakukan, karena orientasi media jurnalisme di satu pihak untuk kepentingan dalam komodifikasi media, dan pihak lain kepada kekuasaan negara untuk menjaga kelangsungan lisensi terbit. Respek terhadap warga di ruang publik belum menjadi landasan operasi media jurnalisme.

(5)

Tantangan dalam dunia jurnalisme di Indonesia adalah dalam hal pemaknaan informasi jurnalisme yang hanya untuk kepentingan teknis dalam menulis berita baik untuk tujuan komodifikasi maupun akibat korporatisme negara. Dengan demikian standar kelayakan berita yang merupakan adaptasi dari buku teks jurnalisme untuk dijadikan manual kerja, bukan sebagai acuan dalam menghadapi warga dalam konteks kehidupan publik. Sebagai profesi, jurnalisme tidak sekadar bagian dari proses manajemen, karena lebih dari itu dia merupakan pekerja dengan kekuasaan (lihat: Johnson, 1972).

Karenanya pertanyaan apakah seorang jurnalis itu kerja perburuhan atau profesi, sama sekali tidak relevan. Sebab sebagai profesi yang memproses wacana untuk bertanding di ruang publik, maka jurnalis adalah seorang intelektual yang memiliki ruang otonomi dan independensi yang mempribadi. Dia dapat saja menjadi bagian dari manajemen sebagai pekerja, buruh atau *koeli* (tinta), tetapi tidak kehilangan otonomi dan independensinya sebagai pekerja kultural, sebagaimana seorang dokter medis yang menjadi karyawan rumah sakit tetapi tidak boleh kehilangan otonomi dan independensinya sebagai pengabdian kemanusiaan.

Seorang jurnalis merupakan pekerja kultural karena pada hakekatnya berurusan dengan wacana. Dia memang menjadi pedagang jika yang diurusnya komoditas ekonomi, atau makelar kekuasaan jika mengurus informasi sebagai komoditas politik. Sebagai pekerja dia tentu saja harus bertanggung-jawab secara teknis kepada manajemen tempatnya bekerja. Tetapi dia terikat secara moral dalam akuntabilitas sosial kepada publik. Tanggungjawab moral inilah yang membedakan pekerja profesional dengan seorang pekerja. Pandangan yang menempatkan jurnalis sebagai pekerja dalam manajemen, telah mereduksi makna kultural profesi ini sebagai pertukangan. Agaknya ini pula yang menyebabkan kemudian pekerja jurnalisme merasa sudah cukup dengan memahami dan menjalankan jurnalisme pada tataran teknis, tidak berkehendak untuk menempatkannya pada tataran epistemologi.

Kesadaran epistemologis akan menumbuhkan sikap kritis dalam menghadapi kaidah-kaidah kelayakan berita yang menjadi acuan kerja. Umumnya kaidah-kaidah itu dikutip dari buku teks bertolak dari asumsi mengenai ruang publik yang normal. Karenanya, insiden misalnya, dianggap bermakna jika proses sosial sebelumnya tertata dalam tertib sosial (*social order*). Pelanggaran hukum menjadi signifikan jika tertib sosial dominan adanya dalam kehidupan sosial. Tetapi bagaimana pemaknaannya jika ruang publik yang menjadi ajang bagi media jurnalisme bersifat anomali?

Ruang publik didominasi oleh sektarianisme agama mayoritas, merupakan anomali yang sulit dipahami. Lazimnya, sektarianisme lahir dari komunitas agama, menyempal dari induknya, sementara komunitas mayoritas akan berkecenderungan inklusif. Dengan kata lain, basis suatu sektarian adalah eksklusifitas komunitas lebih kecil yang berhadapan dengan komunitas lebih besar. Sering terjadi sektarian agama pernah muncul di Indonesia dengan membangun jamaah sendiri melalui tempat ibadah yang terpisah dari komunitas lainnya dengan menganggap komunitas lainnya tidak syah peribadatannya. Secara sosiologis fenomena ini merupakan hal yang normal. Berbeda halnya jika suatu agama mayoritas menciptakan jurang sosial dengan komunitas agama lainnya, maka telah menjadi sektarian dalam basis negara bangsa (*nation state*).

Sektarian lainnya bersifat sekuler mewujudkan melalui eksklusifisme komunitas suku yang menyempal dari negara bangsa. Sektarian semacam ini dapat dipahami karena negara bangsa Indonesia terbentuk melalui imajinasi kolektif atas dasar geo-politik dan kesadaran senasib dalam konteks kesejarahan yang didapat secara empiris. Kesadaran senasib ini mungkin tidak menjadi inspirasi lagi bagi generasi berikutnya yang tidak memiliki pengalaman empiris. Sementara internalisasi makna kesejarahan telah gagal akibat pola sosialisasi yang keliru, antara lain dengan mengagung-agungkan militerisme dalam penegakan dan pembangunan negara bangsa. Dalam pada itu berbagai komunitas suku

bangsa sebagai basis kultural warga mengalami marginalisasi dalam dominasi komunitas yang lebih besar yang identik dengan negara bangsa. Karenanya perekat bagi berbagai komunitas suku bangsa dalam negara bangsa hanyalah birokrasi negara yang menjalankan militerisme, bukan kesadaran senasib dan kesejarahan. Dalam kondisi semacam ini diperlukan pendekatan multikultural sebagai proses sosial (lihat: Kymlicka, 1995).

Di dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang dominan di ruang publik dapat dilihat sebagai anomali sosial. Sebab dalam kehidupan sosial yang normal, tertib sosial pada dasarnya diwujudkan melalui rasionalitas dan hukum yang adil. Jika kedua hal ini tidak menjadi basis dalam kehidupan warga, dengan sendirinya ruang publik menjadi ajang bagi kekuatan fisik. Semula ruang publik sepenuhnya dalam kendali kekuatan fisik negara melalui dengan peran militer yang merasuk ke seluruh aspek kehidupan publik di antero wilayah negara. Kini ruang publik menjadi perebutan dominasi oleh berbagai kekuatan sosial berupa komunalisme, baik atas dasar kelompok massa spontan (*mob*), maupun berbasis agama dan suku. Pada kesempatan lain basis komunalisme massa ini adalah organisasi politik.

Dengan demikian dalam kerangka besar ruang publik diisi dengan sektarianisme agama dan suku dengan orientasi kekerasan fisik. Untuk memahami makna fakta konflik di ruang publik adalah melalui oposisi binarinya, dapat dirangkumkan sebagai berikut:

NEGATIF	KONFLIK	FAKTA	DAMAI	POSITIF
Sektarian agama	←	?	→	Toleran agama
Eksklusif suku	←	?	→	Inklusif bangsa
Kekerasan fisik	←	?	→	Rasionalitas

Dari suatu fakta pilihan orientasi fakta dengan fokus pada konflik atau damai. Orientasi konflik mengandung makna dari wacana sektarian agama, eksklusifitas suku, atau kekerasan fisik. Makna ini dapat bersifat tunggal, dapat pula bersifat multi makna. Konflik di Maluku mungkin bersifat tunggal dimensi yaitu bertolak dari sektarian agama, sementara di Sampit multi dimensi berupa eksklusifitas suku dan sektarian agama. Namun keduanya menggunakan kekerasan fisik.

Orientasi kebijakan pemberitaan akan tercermin dari pemilihan sudut pandang konflik atau damai ini. Seturut dari proses merekonstruksi fakta dapat dilihat kecenderungan dalam memilih narasumber, dengan preferensi dan tingkat obyektifitas atau subyektifitasnya. Preferensi narasumber dapat diidentifikasi dari orientasi kepada salah satu oposisi binari. Sedang obyektivitas narasumber merupakan faktor yang penting, tetapi sering diabaikan. Karena obyektifitas umumnya dilihat dari preferensi media, padahal obyektifitas media hanya beroperasi pada level teknis dengan azas keseimbangan, sementara obyektifitas wacana hanya akan lahir dari obyektifitas narasumber. Obyektifitas secara sederhana diartikan kemampuan melepaskan diri dari kepentingan dan orientasi subyektif. Lebih jauh adalah kemampuan untuk memasuki ranah pihak lain dengan memahami posisi subyektif pihak lain tersebut.

Dari sini bacaan terhadap media pers dapat dilakukan, mulai dengan melihat dimensi makna yang terkandung dalam suatu teks, sehingga informasi jurnalisme dipandang sebagai suatu wacana yang menawarkan suatu makna. Baru kemudian memasuki teks secara teknis untuk melihat bagaimana fakta diolah dan direkonstruksikan dalam format informasi jurnalisme.

REFERENSI

Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas (1967) *The Social Construction of Reality*, Anchor Books, New York

- Berger, Arthur Asa (1998) *Media Analysis Techniques*, second edition, Sage Publication, Beverly Hills
- Bond, F. Fraser (1961) *An Introduction to Journalism A Survey of the Fourth Estate in All Form*, The Macmillan Company
- Brooks, Brian S., Kennedy, George, Moen Daryl R., dan Ranly, Don (1988) *News Reporting and Writing*, third edition, St. Martin Press, New York
- Johnson, Terence J., (1972) *Profession and Power*, terjemahan Supardan (1991) *Profesi dan Kekuasaan, Merosotnya Peran Kaum Profesional dalam Masyarakat*, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Kymlicka, Will, (1995) *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, Oxford
- McQuail, Denis (1987) *Mass Communication An Introduction*, second edition, Sage Publications, London
- Mencher, Melvin (1987) *News Reporting and Writing*, fourth edition, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque
- Mosco, Vincent (1996) *The Political Economy of Communication*, Sage Publication, London
- Piliang, Yasraf Amir (2000) "Hegemoni, Kekerasan Simbolik Media, Sebuah Analisis tentang Ideologi Media", makalah pada Seminar *Keberpihakan Media Cetak dalam Pemberitaan*, Lembaga Studi Perubahan Sosial, Surabaya 22 Mei 2000